DATA PENUNJANG

1. Data Dasar	1. Hasil survey/observasi di lokasi yang telah ditentukan2. Usulan-usulan teknis lain dari sumber-sumber yang dapat dipercaya.3. Studi-studi terdahulu maupun data-data sekunder lainnya yang di perlukan dan dianggap penting
2. Standar Teknis	1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.12/ PRT/ M/2014 tanggal 26 September 2014 tentang penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 28/ PRT/M/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum:3. SNI yang masih Berlaku yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan
3. Studi-Studi Terdahulu	Data Hasil kajian dan musrembang Kota Samarinda
4. Referensi Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.3. Peraturan Pemerintah RI No. 59 tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI No. 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi;4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/ PRT/M/2017 Tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.897/KPTS/M2017 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.7. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Inkindo Nomor 22/SK.DPN/X/2020 Tentang Pedoman Standar Minimal Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) dan Biaya Langsung (Direct Cost) Untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Tahun 2021.8. Peraturan Kepala LKPP yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjajaa.9. Pedoman Standarisasi Biaya Umum untuk keperluan Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021.

RUANG LINGKUP

- 1. Lingkup Pekerjaan**

Ruang lingkup dari kegiatan ini adalah :

 1. Survey dan pengumpulan data lapangan
 2. Perhitungan dan Analisa teknis
 3. Gambar dan perencanaan teknis

- 2. Keluaran**

Produk atau keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini meliputi gambar teknis, spesifikasi teknis, analisa harga satuan dan rencana anggaran biaya. Dan tidak ada Pengawasan Berkala dalam Pelaksanaan Pekerjaan ini.

- 3. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen**

Penggunaan Jasa/Pejabat pembuat Komitmen akan menugaskan/menyediakan personil dari instansi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda) yang bertindak sebagai staf teknis atau pendamping untuk pelaksanaan pekerjaan ini. Untuk fasilitas dari PKK hanya menyediakan ruang untuk rapat-rapat rutin beserta perlengkapannya.

- 4. Peralatan dan Material dari Penyediaan Jasa Konsultan**

Penyedia Jasa diwajibkan untuk menyediakan segala perlengkapan dan peralatan yang berkaitan dengan tugas pengawasan. Barang-barang yang harus disediakan oleh penyedia jasa dengan cara sewa atas nama Pengguna Jasa :

Barang-barang yang harus disediakan oleh penyedia jasa dengan cara sewa :

Tidak Ada

- 5. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa**

Tanggung Jawab Perencanaan

Konsultan perencanaan bertanggung jawab secara profesional atas Perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku. Dalam hal ini pekerjaan yang dilaksanakan harus bisa dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif, sehingga Konsultan perencana dalam melaksanakan tugasnya harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku secara profesional.

Penanggung jawab professional Perencanaan adalah tidak hanya Konsultan sebagai suatu Perusahaan tetapi juga bagi para tenaga ahli professional Perencanaan yang terlibat

- 6. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini diperkirakan selama 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender, terhitung sejak diterbitkannya Surat perintah Mulai Kerja (SPMK)